

## IMPLIKASI DAN TANTANGAN INDONESIA MASUK DALAM KELOMPOK NEGARA BERPENDAPATAN MENENGAH ATAS

Edmira Rivani\*

### Abstrak

Indonesia berhasil masuk *upper middle income country* (UMIC) sehingga mendapatkan beberapa keuntungan antara lain memperkuat kepercayaan investor, mendorong lebih banyak investasi asing, dan memperkuat dukungan pembiayaan. Pemerintah perlu mempertahankan status UMIC dan menargetkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi (*high income country*). Tulisan ini membahas implikasi dan tantangan Indonesia sebagai UMIC. Ada beberapa permasalahan dan tantangan dalam mempertahankan status UMIC seperti kesenjangan vertikal, horizontal, standar kualitas hidup, dan daya saing di masa depan. Implikasi Indonesia menjadi UMIC adalah Indonesia membutuhkan SDM yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta sistem regulasi dan birokrasi yang lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi aktivitas investasi dan dunia usaha. DPR RI, khususnya Komisi VI, VIII dan XI, perlu mengawasi pemerintah terutama dalam komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penguatan perlindungan sosial, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi dalam jangka pendek.

### Pendahuluan

Bank dunia menetapkan Indonesia dalam kelompok berpendapatan menengah ke atas atau *upper middle income country* (UMIC) pada 1 Juli 2023. Hal tersebut didasarkan pada pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia pada tahun 2022 sebesar USD4.580 atau naik 9,8% dari USD4.170 pada tahun 2021,

berada dalam rentang klasifikasi *upper middle income* USD4.466-USD13.845 (Bloombergtechnoz.com, 3 Juli 2023). Indonesia sempat masuk dalam UMIC pada 2019 dengan pendapatan per kapita USD4.070, dengan rentang UMIC kala itu USD4.046-USD12.535. Satu tahun kemudian (2020) Indonesia mengalami penurunan status, masuk kelompok negara berpendapatan



PUSLIT BKD



9 772088 235001

\* Analis Legislatif Ahli Madya bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan (Ekkuinbang).  
Email. edmira.rivani@dpr.go.id

menengah bawah karena pandemi Covid-19 (Bisnis Indonesia, 24 Juli 2023). Belajar dari pengalaman sebelumnya, posisi Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas masih sangat rawan.

Perjalanan sebuah negara dari titik pendapatan rendah sampai tinggi adalah kisah pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Seberapa cepat proses peningkatan kemampuan produksi barang dan jasa dalam jangka panjang ditentukan oleh dua hal, yaitu akumulasi modal fisik dan sumber daya manusia, serta produktivitas dan efisiensi (Kompas, 25 Juli 2023). Penjelasan ini terlihat sederhana, tetapi perlu dicatat, tidak semua negara berhasil lolos keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah, apalagi dengan cepat.

Beberapa keuntungan Indonesia masuk UMIC antara lain memperkuat kepercayaan investor, mendorong lebih banyak lagi investasi asing, dan memperkuat dukungan pembiayaan. Pemerintah perlu mempertahankan status UMIC dan menargetkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi (*high income country*). Tulisan ini membahas implikasi dan tantangan masuknya Indonesia dalam UMIC.

### **Implikasi Indonesia Masuk Kembali dalam UMIC**

Kenaikan kelas memberikan harapan bagi semua orang baik dari dalam maupun luar negeri. Dari sisi investasi, kenaikan kelas meningkatkan dan memperkuat kepercayaan investor dan mitra dagang terhadap Indonesia sehingga dapat menarik investor-investor baru untuk datang ke Indonesia. Di sisi lain, investor atau usaha-usaha yang bergerak di sektor padat karya akan memandang Indonesia bukan lagi tempat yang nyaman untuk berusaha karena upah

buruh murah bukan lagi daya tarik negara-negara dalam kategori UMIC. Dari sisi perdagangan internasional, produk ekspor Indonesia harus bersaing lebih keras karena produk Indonesia akan semakin sedikit yang mendapatkan keringanan tarif perdagangan, seperti layaknya negara-negara pendapatan bawah. Dari sisi kerja sama internasional, kenaikan kelas menjadikan Indonesia dianggap mampu untuk membayar utang dengan suku bunga yang lebih tinggi sehingga akan membatasi ruang dalam mendapatkan kemudahan pinjaman dan suku bunga rendah. Kenaikan kelas akan memaksa Indonesia untuk berderma bagi negara-negara lain yang berada di bawahnya sehingga perlu ada perubahan pola pikir para pemangku kepentingan dari mental penerima menjadi mental pemberi.

Beberapa implikasinya: *Pertama*, Indonesia tidak bisa lagi terlalu mengandalkan akumulasi modal fisik dan tenaga kerja yang murah. Dalam jangka pendek ekonomi masih bisa tumbuh dengan mengandalkan pergerakan faktor produksi ke sektor-sektor yang produktif, karena masih ada disparitas produktivitas tenaga kerja antarsektor yang lumayan (INDEF, 2021). Untuk meraih status negara berpendapatan tinggi, Indonesia perlu menggeser mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang ke arah aktivitas berbasis teknologi dan inovasi. *Kedua*, perbaikan kualitas SDM melalui pendidikan dan berbagai pelatihan. Akumulasi *human capital* dalam bentuk pendidikan dan kegiatan riset dan pengembangan (R&D) punya dampak tambahan produksi (*spillover effect*) yang besar, dan, yang lebih penting, berkesinambungan (kompas.id, 14 Juli

2023). Karakteristik ini kian penting terutama ketika perekonomian mendekati batas kapasitas produksinya.

*Ketiga*, institusi harus berubah untuk mendukung mesin pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Percuma mempunyai target keluar dari perangkap pendapatan menengah (*middle income trap*) jika tak ada reformasi kelembagaan yang serius (fiskal.kemenkeu.go.id, 3 Juli 2023). Dari negara berpendapatan menengah atas menuju negara kaya, perlu pertumbuhan ekonomi yang didorong kemajuan teknologi, efisiensi, dan inovasi. *Keempat*, selalu ada kemungkinan turun kelas dari kelompok negara berpendapatan menengah atas. Pengalaman turun kelas Indonesia pada tahun 1998 dan 2020 karena pandemi Covid-19, menjadi bukti nyata rentannya posisi Indonesia dalam kelompok UMIC (kompas.id, 14 Juli 2023).

### **Tantangan Indonesia Sebagai UMIC**

Untuk merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6%-7% per tahun secara konsisten. Indonesia perlu mengatasi beberapa tantangan. *Pertama*, kesenjangan vertikal. Masalah kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin masih menghantui komposisi penduduk Indonesia. Rasio gini yang menjadi ukuran kesenjangan masyarakat menunjukkan angka relatif besar. Dalam kurun 2010 hingga 2019, rasio gini hanya bergerak sedikit dari angka 0,378 menjadi 0,380 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial

di Indonesia tak banyak mengalami perubahan fundamental (Bisnis Indonesia, 24 Juli 2023). Persoalan ini menjadi tugas penting pemerintah untuk mampu menurunkan rasio itu secara signifikan sehingga pada saat Indonesia mencapai tujuan akhir menjadi negara maju, masalah kemiskinan sudah selesai. Laporan Global Wealth Report 2018 memperlihatkan bahwa 1% orang terkaya Indonesia ternyata menguasai 46% kekayaan penduduk Indonesia, dan 10% orang terkaya menguasai 75,3% kekayaan penduduk Indonesia (Credit Suisse, 2018). Fakta di atas memperlihatkan bahwa *trickle-down effect* dari pembangunan belum sepenuhnya berhasil, justru yang terjadi adalah *trickle-up effect*. Oleh sebab itu, kenaikan status UMIC tersebut jangan sampai memperbesar dominasi orang kaya dalam pembangunan ekonomi, melainkan mampu meningkatkan pemerataan pendapatan bagi kelompok lainnya.

*Kedua*, kesenjangan horizontal. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dihadapkan pada masalah pemerataan pembangunan antara daerah yang satu dan daerah lainnya yang belum semuanya sama. Bukti empiris yang kurang menggembirakan adalah masih banyak daerah yang memiliki sumber kekayaan alam besar justru mayoritas penduduknya miskin, seperti yang dialami oleh Provinsi Papua dan Papua Barat. Demikian halnya dengan kesenjangan yang terjadi antara pulau yang satu dan pulau lainnya juga tidak sama sehingga apabila tidak tertangani dengan baik justru akan memperdalam gap kesenjangan sosial antardaerah tersebut. Masalah kesenjangan sosial ini menjadi isu yang sensitif karena dapat memicu potensi disintegrasi bangsa dan mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena itu, peningkatan status menjadi

**Tabel 1. Peringkat *Global Competitiveness Index* Tahun 2010-2019**

Negara	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Singapura	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1
Malaysia	26	21	25	24	20	18	25	23	25	27
China	27	26	29	29	28	28	28	27	28	28
Thailand	38	39	38	37	31	32	34	32	38	40
Rusia	63	66	67	64	53	45	43	38	43	43
Indonesia	44	46	50	38	34	37	41	36	45	50
Afrika Selatan	54	50	52	53	56	49	47	61	67	60
Filipina	85	75	65	59	52	47	57	56	56	64
Vietnam	59	65	75	70	68	56	60	55	77	67
India	51	56	59	60	71	55	39	40	58	68
Brazil	58	53	48	56	57	75	81	80	72	71

Sumber: *World Economic Forum*, 2021.

UMIC harus dapat dinikmati pula oleh masyarakat yang tinggal di luar Pulau Jawa.

*Ketiga*, standar kualitas hidup. Masalah kualitas hidup penduduk Indonesia perlu terus ditingkatkan sejalan masuknya Indonesia menjadi UMIC. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan UNDP merupakan indikator yang dipakai sebagai alat untuk mengukur standar kualitas hidup semua negara di dunia, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin bagus kualitas hidupnya. Wilayah Indonesia bagian timur, seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB, memerlukan perhatian lebih agar kualitas hidup mereka mempunyai standar yang sama dengan daerah-daerah lain. Peningkatan status Indonesia sebagai UMIC harus mampu meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat Indonesia ke level lebih tinggi secara adil dan merata di semua daerah (kompas.id, 16 Juli 2023).

*Keempat*, daya saing masa depan. Kenaikan status Indonesia tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan daya saing Indonesia dengan negara-

negara lain di kancah global. Forum Ekonomi Dunia yang mengeluarkan *Global Competitiveness Report 2019* menempatkan Indonesia di peringkat ke-50 (Bisnis Indonesia, 24 Juli 2023), masih kalah bersaing dengan peringkat Singapura (1), Malaysia (27), dan Thailand (40) (Tabel 1.).

Peringkat daya saing tersebut merupakan indikator yang memberikan informasi mengenai kemampuan negara memberikan kemakmuran bagi penduduknya. Momentum masuknya Indonesia ke dalam UMIC harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya agar mampu mendongkrak daya saing global Indonesia ke level yang lebih tinggi.

## Penutup

Salah satu makna Indonesia masuk kembali dalam UMIC adalah kesejahteraan ekonomi menjadi lebih baik. Beberapa hal yang harus dilakukan sebagai implikasi Indonesia masuk UMIC adalah menghasilkan SDM yang berkualitas, meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis teknologi dan inovasi, reformasi kelembagaan, serta antisipasi kemungkinan

Indonesia turun kelas kembali dari UMIC.

Posisi yang didapatkan Indonesia ini masih dalam batas bawah, sehingga perlu mengejar target sebagai negara maju. Indonesia perlu mengatasi beberapa tantangan seperti kesenjangan vertikal, horizontal, perlunya peningkatan standar kualitas hidup di Indonesia, dan peningkatan daya saing Indonesia di kancah global. DPR RI, khususnya Komisi VI, VIII, dan XI, perlu mengawasi pemerintah terutama dalam komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi dalam jangka pendek.

### Referensi

- Credit Suisse. 2018. *Global Wealth Report 2018*. Switzerland: Credit Suisse, hal. 50.
- “Ekonom: Indonesia Jangan Berpuas Diri Jadi Negara Menengah Atas”, [www.bloombergtechnoz.com](http://www.bloombergtechnoz.com), 3 Juli 2023, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/9578/ekonom-indonesia-jangan-berpuas-diri-jadi-negara-menengah-atas>, diakses 25 Juli 2023.
- INDEF. 2021. *Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing: Pemikiran 100 Ekonom Indonesia*. Jakarta: INDEF, hal.18.

“Negara Berpendapatan Menengah Atas, Mengapa Baru Sekarang?”, [www.bloombergtechnoz.com](http://www.bloombergtechnoz.com), 14 Juli 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/07/14/negara-berpendapatan-menengah-atas-mengapa-baru-sekarang/>, diakses 24 Juli 2023.

“Peluang dan Tantangan Menjadi Negara Berpendapatan Menengah Atas”, [www.kompas.id](http://www.kompas.id), 16 Juli 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/07/16/peluang-dan-tantangan-menjadi-negara-berpendapatan-menengah-atas/>, diakses 24 Juli 2023.

“Pendapatan Menengah Atas: Pertaruhan Menjaga Takhta”, *Bisnis Indonesia*, 24 Juli 2023, hal. 3.

“Pulih Kuat dari Pandemi, Indonesia Kembali Naik Menjadi Kelas Menengah Atas”, [fiskal.kemenkeu.go.id](http://fiskal.kemenkeu.go.id), 3 Juli 2023, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/501>, diakses 25 Juli 2023.

World Economic Forum. 2021. *The Global Competitiveness Report 2019*. Switzerland: World Economic Forum, hal. 13-21.